

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat sebagai salah satu negara korban terorisme internasional, tentunya dalam melaksanakan politik luar negerinya juga berorientasi pada kepentingan nasional yang di dasarkan pada kondisi obyektif baik di dalam negeri maupun kondisi politik internasional yang berkembang saat ini. Di satu sisi, politik luar negeri Amerika Serikat dapat berperan untuk melindungi negara lain dengan cara memperluas kepentingan AS di seluruh dunia, disisi lain AS mempunyai tugas mengubah sistem internasional sedapat mungkin seperti keinginannya yang di dasarkan atas kemauan dan citranya sendiri dan AS menginginkan kedua cara itu dalam politik luar negerinya.

Pasca penyerangan 11 september terhadap gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap teroris. Trauma yang sangat mendalam sebagai akibat aksi dari serangan-serangan terorisme tersebut membuat Amerika Serikat sangat reaksioner dalam sikapnya menghadapi isu terorisme yang berkembang saat ini. Amerika Serikat sangat cepat merespon terhadap setiap isu terorisme.

Dalam masa sebelum terjadinya tragedi 11 September, Indonesia bisa dikatakan tidak menjadi bagian penting dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Ada dua alasan utama mengapa hal ini terjadi. Pertama, karena faktor historis. Dalam kadar tertentu, perhatian yang kecil dari pembuat kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia sebenarnya merefleksikan sikap publik

Amerika Serikat pada umumnya. Jika dibandingkan dengan Filipina dan Vietnam, publik Amerika memang tidak memiliki sentiment historis yang kuat dengan Indonesia. Indonesia tidak mempunyai pengalaman di bawah pemerintahan Amerika Serikat seperti yang pernah dialami Filipina. Publik Amerika juga tidak memiliki pengalaman historis yang getir dengan Indonesia seperti dialami tentara Amerika Serikat pada perang Vietnam di awal 1970-an

Kedua, karena faktor struktural. Harus diakui, kapabilitas power yang dimiliki Indonesia baik dari dimensi ekonomi, militer, dan politik amat tidak signifikan di tingkat internasional. Untuk kawasan Asia, Amerika Serikat sebenarnya jauh lebih memberi perhatian kepada China, Jepang, dan India. Secara ekonomi, misalnya, Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Jepang.¹

Akan tetapi, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tragedi 11 September telah mengubah pola Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat termasuk terhadap Indonesia. Secara keseluruhan ada beberapa potensi yang dimiliki Indonesia sehingga menimbulkan ketertarikan Amerika Serikat sehubungan keterlibatan Indonesia dalam kampanye anti terorisme Amerika Serikat. Potensi-potensi tersebut adalah, yang pertama penduduk muslim Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Sebagaimana yang diketahui kampanye global anti terorisme Indonesia secara mayoritas ditujukan pada kelompok-kelompok islam radikal seperti Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Potensi yang dimiliki Indonesia ini sangat penting bagi pelaksanaan kampanye anti terorisme Amerika Serikat karena apabila mendapat dukungan dari Indonesia, Amerika Serikat dapat memperbaiki

¹ Makmur Keliat, "Hubungan Indonesia-Amerika Serikat". <http://www.kompas.com>/Diakses 20 Februari 2014

sentiment yang ditujukan pada negara tersebut sebagai negara anti muslim oleh kebanyakan kelompok-kelompok pro Islam di dunia. Sebaliknya, jika Indonesia berada dalam sikap konfrontasi akan meyulitkan posisi Amerika Serikat.

Kedua, Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi terbesar ketiga. Bahkan jika melihat berdasarkan jumlah hasil pemilihan umum tahun 1999, Indonesia menjadi negara dengan tingkat partisipasi terbesar kedua setelah India dengan jumlah pemilih 90%.² Hal ini bisa dijadikan sarana untuk membangun kesamaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga dalam rangka mengimbangi kebertolakbelakangan tentang gerakan radikal islam.

Keempat, kondisi dunia Internasional saat ini meningkatkan arti penting Indonesia. Saat ini, mayoritas negara-negara Islam termasuk Indonesia yang seharusnya dekat dengan Amerika Serikat justru tidak digarap dengan baik oleh Amerika Serikat sehingga mulai merapat ke Rival Amerika Serikat yaitu Cina dan Rusia. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke cina yang disusul dengan kunjungannya ke Rusia membuat Amerika Serikat terusik. Hal ini disebabkan setelah kunjungan ke Cina dan Rusia, Indonesia dapat menjajaki kemungkinan paket non ekonomi seperti pembelian senjata dan peralatan militer yang tentunya akan membuat Amerika Serikat semakin risau.³

Faktor-faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai bagian dari kepentingan politis Amerika Serikat yang harus ditangani secara tepat dalam kebijakan politik luar negerinya. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat merasa perlu terlibat dalam penanganan terorisme di Indonesia.

² www.kpu.go.id /Diakses 20 Agustus 214

³ "Isu Terorisme Cermin Kepentingan AS" <http://www.beritasore.com> /Diakses 2 Februari 2011

Apalagi pasca tragedi bom Bali oktober 2002 terus terjadi serangkaian pengeboman di berbagai wilayah Indonesia seperti ledakan di McDonald Makasar, Sulawesi Selatan, di kedutaan Australia di Kuningan hingga pengeboman di dua hotel Internasional, JW Marriot, Ritz Carlton dan beberapa tempat lainnya. Beberapa kejadian itu menjadi indikasi kuat bahwa ada kelompok teroris yang sedang beroperasi di Indonesia.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut, Amerika Serikat semakin gencar memberikan perhatian dan dukungan nyata terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap pelaku utama terorisme. Secara keseluruhan berbagai aksi terror bom di Indonesia, nampak bahwa Indonesia menjadi salah satu sasaran aksi jaringan terorisme internasional dan para pelakunya melakukan tindakan perekrutan anggotanya dari bagian masyarakat Indonesia.⁴

Terlebih lagi ketika kembali terjadi bom Bali II pada 1 Oktober 2005 yang menyebabkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia semakin berkurang karena dianggap gagal dalam usaha *counter-terrorism*⁵. Terjadinya peristiwa bom Bali II ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia maupun dunia internasional yaitu, mengapa terorisme terjadi lagi di Indonesia.

⁴ Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2007. Strategi Pertahanan Negara. Jakarta : Departemen Pertahan Republik Indonesia. Hal 25

⁵ (www.crisisgroup.org, 2005, diakses pada 11 Agustus 2014)

Dalam kondisi ini pemerintah yang bertugas menangani masalah terorisme seperti Badan Intelijen Negara (BIN) tidak optimal, Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengkaji sistem keamanan yg harus dilakukan oleh Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga mengambil pilihan yang sulit antara lain dengan bekerjasama dengan negara-negara besar lainnya untuk membantu menangani teroris dengan resiko membiarkan adanya campur tangan dalam bidang keamanan masuk mencampuri kedaulatan Indonesia, atau berupaya sendiri menangani aksi terorisme di dalam negeri Indonesia dengan resiko efisiensi yang kurang optimal mengingat terorisme yang bersifat transnasional crime diperkirakan membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Oleh karena itu kondisi dilematis ini mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat.

Indonesia yang pada awalnya bersikukah bahwa jaringan Al-Qaeda tidak ada di tanah air semakin dipojokan oleh desakan Internasional untuk mengakui bahwa tragedi di Bali adalah bukti adanya jaringan teror. Amerika Serikat berkeyakinan bahwa Indonesia tidak mampu memberantas terorisme tanpa bantuan AS dan berusaha menekan pemerintahan Indonesia agar menerima bantuan militer / Intelijen untuk memberantas Terorisme. Hal itu yang kemudian menjadikan Indonesia mendukung kebijakan AS dalam memerangi teroris, bukti dukungan Indonesia terlihat pada upaya-upaya dalam memerangi terorisme yakni melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasional. Salah satu contohnya adalah di level internasional melalui Counter Terrorism Commite (CTC, yang merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme AS.

Penanggulangan terorisme di Indonesia tak lepas dari Adanya dukungan Internasional khususnya Amerika Serikat. Meskipun dari dalam negeri muncul tuduhan bahwa perang yang dipimpin AS melawan terorisme merupakan upaya untuk memajukan kekuatan Amerika dan melemahkan dunia Islam⁶. Amerika Serikat berkeinginan memiliki tujuan ganda dalam tatanan dunia internasional yakni menciptakan kestabilan internasional dan melenyapkan terorisme.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat permasalahan yang perlu diidentifikasi terkait dengan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, yaitu :

Bagaimana bentuk-bentuk bantuan Amerika Serikat dalam upaya pemberantasan terorisme sebagai wujud dari kerjasama Indonesia – Amerika Serikat?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mencari jawaban secara umum atas pertanyaan didalam rumusan masalah, sedangkan secara khusus bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa serta menggambarkan bagaimana bentuk politik luar negeri AS dalam memerangi terorisme internasional, khususnya pada Indonesia.

⁶ Emmerson, Donald K., 2002. "Whose Eleventh? Indonesia and the United States Since 11 September", dalam *Brown Journal of World Affairs*, 9 (1): 115-126.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa serta menguraikan bentuk-bentuk bantuan Amerika Serikat dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami fenomena Hubungan Internasional maka perlu penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep-konsep sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakan. Untuk dapat menganalisis langkah-langkah memerangi terorisme tersebut, maka penulis menggunakan konsep Terorisme, Counter Terrorism dan Foreign Aid (Bantuan Luar Negeri).

a. Konsep Terorisme

Istilah terorisme sendiri bukan sesuatu yang baru, bahkan sejak revolusi prancis terjadi, istilah tersebut sudah ada. Terrorisme berasal dari kata "terror" yang berarti perbuatan yang sewenang-wenang, usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan "Terrorisme" berarti penggunaan kekuasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan (terutama politik)⁷.

Ada beberapa karakteristik dari terorisme, pertama, terorisme merupakan aksi dengan tujuan berdasarkan kepentingan kelompok bahkan mungkin komunitas yang lebih besar lagi (Negara). Kelompok teroris berusaha menggulingkan pemerintah yang ada. Kedua, aksi terror ditujukan untuk mendapatkan perhatian, publikasi maupun simpati masyarakat dunia. Mereka bermaksud menunjukkan eksistensi dan tujuan kelompok mereka. Ketiga, terorisme sengaja menciptakan instabilitas politik, ketidak merataan, gejala

⁷ Jack C. Plano, *The American Political Dictionary*, New York CBS College Publishing, 1985.

ekonomi serta perpecahan kelas dalam masyarakat, aksi ini lebih bersifat domestik, dilakukan kelompok radikal suatu negara. Keempat, terorisme menjadi alat untuk menuntut pembebasan tahanan politik yang ada di penjara-penjara luar negeri atau menuntut uang tebusan.

Dalam kamus Internasional, terorisme didefinisikan sebagai “kegiatan negara atau pelaku non negara yang mempergunakan teknik kekerasan dalam usahanya menggapai tujuan politik”⁸. Kegiatan terorisme bukan kejahatan dengan keuntungan motif material, tetapi mengharapkan keuntungan non material yang sering digolongkan sebagai kepentingan politik. Sasaran jangka panjang terorisme adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat akan kemampuan suatu sistem pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Terrorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu: sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut. Terorisme memiliki pengertian sebagai berikut :

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, “Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas”. Menurut US Departement of Defense tahun 1990. “Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi”. Dan

⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton, *kamus Hubungan Internasional jakarta*, Putin A Bardin 1999. Hal 169

menurut TNI-AD, tentang Anti Teror tahun 2000. "Terrorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan."⁹

Beberapa kelompok teroris menggunakan aksi-aksi teror yang bertujuan jangka pendek tersebut untuk melemahkan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Tujuan jangka panjang dari terorisme itu sendiri antara lain :

1. Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintah seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara.
2. Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya.
3. Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional, atau Internasional dan memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.

Berdasarkan perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri-ciri terorisme adalah sebagai berikut :

1. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun.
2. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.

⁹ www.buletinlitbang-dephan.go.id. Definisi terorisme 2002 / Diakses 22 Agustus 2014

3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dll.
4. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Terroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif terorisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori : rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas menjadi :

1. Membebaskan tanah air
2. Memisahkan diri dari pemerintah yang sah (separatis)
3. Sebagai protes sistem yang berlaku
4. Menyingkirkan musuh-musuh politik

b. Kebijakan Kontra- Terorisme (Counter Terrorism)

Konsep yang kedua adalah counter terrorism untuk mengkaji strategi dan cara-cara menangani terorisme. Menurut Ahmad Syafi'i *Counter Terrorism* adalah tindakan perlawanan terhadap terorisme dan dilakukan dalam bentuk tindakan keras, misalnya berupa penangkapan¹⁰. Menurut Neil C. Livingstone pilihan untuk memberantas dan menekan terorisme dapat dilakukan dengan respon yang terus menerus dari sikap tenang, mengukur pertahanan dan inisiatif diplomatic pada satu sisi sampai pilihan kekuatan pada akhirnya, dalam

¹⁰ www.suara.merdeka.com. Ahmad Syafi'i, *Tafsir Terorisme*, Rabu, 27 febuari 2002

hubungan ini, tanggapan yang proaktif terhadap terorisme dapat dibagi menjadi tiga kategori : *Reprisial, Preemption and Retribution*.¹¹

Reprisial (tindakan pembalasan) atau tindakan balasan merupakan hukuman bagi tindakan-tindakan ilegal yang tidak mempunyai bentuk perdamaian. Kelebihan strategi ini adalah adanya bukti yang kuat bagi suatu negara untuk memberantas dan memerangi terorisme dan menghukum kelompok terorisme yang lain melakukan berbagai aksinya. Kekurangannya adalah, akan adanya korban jiwa dan kerusakan terlebih dahulu dikarenakan serangan terorisme.

Preemption (pencegahan) merupakan tindakan mendahului sebelum tindakan dilakukan oleh teroris. *Preemption* dilakukan bukan karena memberi hukuman seperti reprisial, namun lebih sebagai tindakan proteksi, pencegahan dari serangan teroris yang menyebabkan kematian dan kehancuran.

Kelebihan dari *preemption* adalah dapat mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme dikarenakan sebelum kelompok terorisme melancarkan serangan sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh militer. Kelemahannya adalah, apabila data dan bukti-bukti yang diberikan oleh intelejen kurang akurat maka akan terjadi pembunuhan orang yang tidak berdosa dan kerusakan yang tidak diinginkan.

¹¹ Neil C. Livingstone, *Proactive Responses to Terrorism: Reprisial, preemption, and Retribution*, dalam *Grand world Law, Political Terrorism theory, Tactical and Counter Measures*, P 219-225

Retribution (balas jasa) atau balas jasa lebih bersifat politis dari aksi-aksi militer. Pada umumnya tindakan politis lebih bersifat lunak, kompromi, dari pada tindakan militer. Kelebihan dari strategi ini adalah, tidak adanya korban jiwa dimana kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya serangan yang dilakukan oleh keduanya. Strategi ini lebih mementingkan perdamaian dari pada kekuatan senjata. Kekurangan dari strategi ini adalah akan memakan waktu yang lama dalam penyelesaian damai tersebut, dan pihak negara harus mau berkompromi dengan pihak teroris.

Di Indonesia sendiri dalam penanganan terorismenya lebih cenderung pada pendekatan *preemption*, mengingat dalam penanggulangan terorisme, Indonesia banyak mendapat bantuan serta pengaruh dari Amerika Serikat. Terbukti dari strategi pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88. Jika kita lihat, kinerja Densus 88 selama ini banyak melakukan tindakan ekstrim untuk menangkap teroris, seperti penangkapan yang tak sesuai prosedur hukum, tembak mati terhadap mereka yang terduga teroris. Kontroversi dari tindakan Densus 88 dengan menembak mati (*extra judicial killing*) terhadap mereka yang diduga teroris. Padahal masih dugaan, bukan tersangka apalagi terdakwa.

Melalui doktrin ini, AS telah menekan Indonesia agar mampu mengambil tindakan terlebih dahulu, khususnya melalui tindakan militer, untuk menghancurkan apa yang dianggap berpotensi sebagai ancaman terror. Dalam konteks doktrin *preemption*, prinsip kedaulatan negara, arti penting dan peran

institusi-institusi multilateral seperti PBB dan organisasi regional, serta ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat saja diabaikan.

Penanggulangan terorisme dengan pendekatan ini mengacu pada strategi ofensif dan penggunaan kekuatan militer untuk memberantas terorisme yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan mengedepankan hard power serta dapat menyisakan beberapa masalah seputar HAM, khususnya di negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia.

c. Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid)

Konsep yang ketiga adalah *Foreign Aid*. *Foreign aid* adalah kegiatan transfer sumber daya dari satu negara kaya ke negara lainnya yang lebih miskin. *Foreign aid* telah muncul sejak sebelum perang dunia kedua. Pada saat itu ada semacam norma tak tertulis dimana pemerintah negara kaya mempunyai semacam tanggung jawab untuk membantu negara lain yang miskin atau terbelit situasi krisis. Namun norma semacam itu sekarang sulit sekali untuk kita temukan. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pergeseran perspektif dalam memaknai *foreign aid*. Variabel-variabel semacam perubahan tatanan politik domestik negara donor, peristiwa-peristiwa internasional, serta tekanan dari organisasi internasional untuk pengalokasian *foreign aid* untuk pengembangan kemanusiaan yang lebih baik sangat berperan dalam menentukan arah perubahan kebijakan bantuan luar negeri.

Selain itu sistem internasional yang anarki menciptakan kebebasan otonomis diantara negara-negara. Hal tersebut membuat sebuah sistem

internasional dimana setiap negara adalah berdaulat, menggunakan *power* mereka. Saat terlibat pada hubungan/ permainan *power* politik dengan negara lainnya. Dalam *setting* seperti ini, bantuan internasional/ bantuan luar negeri (*foreign aid*) praktis hanya menjadi sebuah alat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Alat kebijakan ini dalam pandangan realis dilihat sebagai sebuah hasil dari perang dingin yang digunakan dalam kompetisi diantara kekuatan *great power*. Bantuan internasional di pandang sebagai sebuah senjata kunci dalam perang dingin untuk memperbesar kemungkinan beraliansinya negara-negara dunia ketiga kedalam salah satu kubu *great power*.

Kehadiran bantuan internasional dianggap sebagai sebuah instrument kebijakan sejak adanya kepentingan luar negeri yang tidak dapat diamankan dengan penanganan militer dan untuk mendukung metode diplomasi yang sebenarnya "tradisional" namun dalam bungkus yang lebih pantas. Selain kegunaan bantuan internasional sebagai instrument untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri, dalam prakteknya muncul bahwa kebijakan bantuan luar negeri meng-*cover* pula banyak disparitas tujuan dan kegiatan, sebagai respon dari berbagai macam kebutuhan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, berhubungan maupun tidak berhubungan pada tujuan politik sebuah kebijakan luar negeri¹².

Ada lima tujuan kebijakan bantuan luar negeri, yaitu: *military, prestige, humanitarian, economic, dan subsistence*¹³. Tipologi ini digunakan untuk

¹² (Morgenthau, 1962, p.301)

¹³ Morgenthau (1962) dalam artikel "A Political Theory of Foreign Aid"

mengorganisasikan kompleksitas kebijakan yang di labeli dengan nama "*foreign aid*". Berdasarkan hal ini maka ada dua tipe strategi yang digunakan untuk mendapatkan pengaruh: propaganda dan suap (propaganda dan suap). Sebagian besar tipe bantuan internasional yang diidentifikasi bersifat politis, hanya sedikit yang sifatnya *humanitarian foreign aid*. Artinya, hal yang seharusnya bersifat non-politis kemudian bersifat sangat politis ketika diletakkan dalam konteks politik.

Sedangkan dalam arti luas, K.J. Holsti dalam bukunya "*International Politics Framework of Analysis*" mengartikan bantuan luar negeri¹⁴ sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima. Empat tipe utama bantuan luar negeri :¹⁵

1. Technical assistance / bantuan teknis.
2. Grants / hibah, dan program impor komoditi.
3. Pinjaman pembangunan.
4. Bantuan kemanusiaan yang sifatnya darurat (Emergency Humanitarian Assistance).

Program-program bantuan pemberantasan terorisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Salah satu program FMF (*Foreign Military Financing*)/Pendanaan bagi Militer Asing, FMS: *Foreign Military Sales*, IMET (*International Military Education and Training*), dll yang mengusung kepentingan Amerika Serikat didalamnya yaitu bantuan ditujukan bagi Indonesia untuk mewujudkan reformasi militer dan untuk meningkatkan

¹⁴ K. J Holsti, *International Politics: A Framwork for Analysis*, (new Jersey: Pretince Hall), 1995. P 180

¹⁵ Holsti, Ibid, hal. 182

keamanan laut, kontra-terorisme, mobilitas, dan kemampuan untuk mengatasi keadaan bahaya.

Dalam prakteknya bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep, juga suatu teori yang berhubungan dengan mengalirnya modal atau nilai kebendaan atau jasa-jasa kepada pihak lain di luar negeri dengan tujuan membantu atau dalam rangka kerjasama satu sama lain untuk tujuan tertentu.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa bantuan Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam usaha memberantas terorisme adalah :

- a. Dukungan Finansial (untuk mendukung pelatihan dan peralatan canggih)
- b. Capacity Buildings (melatih profesionalisme dan keahlian teknis militer oleh CIA, FBI dan U.S Secret Service).
- c. Dukungan Diplomasi (dukungan moril dan kerjasama diplomatik pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia dalam memberantas terorisme)

F. Jangkauan Penulisan

Pada penelitian ini diberikan batasan waktu dengan maksud untuk mempermudah penulis dalam menganalisa persoalan yang akan dilakukan sehingga penulisan menjadi jelas, dan diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun batasan waktunya adalah dari tahun 2002 sampai sekarang. Dimana pada waktu kepemimpinan megawati sampai Susilo Bambang Yudhoyono.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik Library Research atau penelitian kepustakaan yang meliputi literature-literatur, jurnal-jurnal, makalah, majalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan Analitik.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan, serta data-data kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan dianalisis secara Kualitatif, yaitu dari sekian banyak data yang terkumpul akan diseleksi dan dipilih yang paling berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran masalah tersebut disertai pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada serta relevansinya terhadap data yang ada.

Internet, untuk memperoleh data yang tidak didapatkan melalui studi pustaka, maka internet digunakan untuk mendapatkan data tersebut, adapun website yang digunakan adalah website Departemen Pertahanan RI serta website-website lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang ada.

I. Sistematika Penulisan :

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci kedalam sub-sub bab.

Adapun sistematika penulisan itu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisikan langkah-langkah pembuatan skripsi sebagai pedoman langkah berikutnya. Langkah-langkah tersebut tersusun sebagai berikut: Judul, tujuan penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika penulisan.

Bab II Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Terorisme, karakteristik dasar politik luar negeri Amerika Serikat, kebijakan umum AS terhadap isu terorisme, dinamika politik luar negeri AS terhadap isu terorisme.

Bab III Terorisme di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya, aksi terorisme di Indonesia, dampak peristiwa bom di Indonesia, upaya pemerintah dalam menanggulangi terorisme.

Bab IV Bentuk-bentuk Bantuan Amerika Serikat Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, dukungan financial, capacity buildings, dukungan diplomasi.

Bab V Kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab I, bab II, bab III dan bab IV.